

**PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, PENGAWASAN
FUNGSIONAL DAN PENGENDALIAN INTERN
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
DAERAH
(Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi)**

Oleh:

Lidia Hasnani

Pembimbing : Taufeni Taufik dan Eka Haryani

Prog. Study Accounting, Faculty of Economics Univ. Riau, Pekanbaru, Indonesia
e-mail : Dya_lov3rs@yahoo.com

*The Effects of Organizational Commitment, Functional Supervising and
Government's Internal Control System to the Performance of Local Governments
(The Empirical Study on SKPD Kabupaten Kuantan Singingi)*

ABSTRACT

This study aimed to examine organizational commitment, functional supervising and government's internal control system toward performance of local governments. The population in this study is SKPD in Kabupaten Kuantan Singingi. The sample selections using total sampling, with 50 respondents. The data used in this study in the form of primary data. The data of this study was collected by using survey techniques, where the researcher distributed questionnaires to each SKPD's chairman and chief of financial SKPD. The technique of data analysis used multiple regression analysis by using Statistical Package for Social Science (SPSS) program. This research proves that the organizational commitment bring a significanton performance of local governments with regression coefisient 0,231 and significant value 0,042 (alpha 0,05), this is shown by the result of t_{count} 2,088 which is higher than the t_{table} 2,000. Functional supervising bring significantion performance of local governments with regression coefisient 0,202 and significant value 0,026 (alpha 0,05), this is shown by the result of t_{count} 2,308 which is higher than the t_{table} 2,000. Government's internal control systems bring significanton performance of local governments with regression coefisient 0,131 and significant value 0,041 (alpha 0,05), this is shown by the result of t_{count} 2,098 which is higher than the t_{table} 2,000.

Keywords: Organizational Commitment, Functional Supervising, Internal Control System and Performance of Local Governments.

PENDAHULUAN

Keberadaan pemerintah dalam suatu negara merupakan suatu hal yang penting, karena kebijakan-kebijakan yang diterapkan dapat menjadi suatu pedoman untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu melalui

pelaksanaan pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan nasional ini mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.

Pelaksanaan pembangunan nasional ini juga untuk mewujudkan tujuan nasional. Kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat yaitu desentralisasi, dan penetapan desentralisasi dilakukan melalui otonomi daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah dapat berjalan dengan baik apabila memiliki pedoman dan sistem yang kuat untuk memastikan dan menjamin bahwa visi, misi, tujuan, sasaran, program serta kegiatan dapat terlaksana dan mencapai hasil dengan baik. Pedoman dan sistem dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yaitu dengan menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah.

Kondisi di Indonesia menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 358 LKPD yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2011 menemukan 3.397 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern.

Di Kabupaten Kuansing BPK RI juga menemukan permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern pada LKPD tahun 2011, yaitu (1) Penyusunan RKA SKPD tidak didasarkan pada

analisis standar biaya; (2) Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada dinas Pendapatan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (3) Dokumentasi dasar sapi dijual dalam pengelolaan sapi dana bergulir oleh dinas peternakan tidak di administrasikan dengan baik; (4) Pengelolaan keuangan pada dinas Pendidikan tidak tertib; (5) Penambahan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Kuansing pada PT. Bank Riau Kepri sebesar Rp2.457.400.000,00 dilakukan tanpa peraturan daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal. (siaran pers BPK RI perwakilan Provinsi Riau, 2011).

Kondisi ini mendorong organisasi pemerintahan untuk dapat mengelola jasa pelayanan secara baik dan bertanggungjawab. Sebab, apabila dikelola secara baik dan bertanggungjawab, organisasi tersebut akan memberikan kontribusi pemasukan kepada kas daerah, yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan organisasi yang profesional sehingga mampu menciptakan suatu organisasi yang berorientasi pada Value for Money (effectivity, efficiency, economy) (Mardiasmo, 2009).

Value for Money akan dapat terwujud jika didukung adanya komitmen semua individu dalam organisasi atau yang sering disebut komitmen organisasi (Robbins, 2007). Komitmen organisasi adalah komitmen yang diciptakan oleh semua komponen-komponen individual dalam menjalankan operasional organisasi. Komitmen tersebut dapat terwujud apabila individu dalam organisasi, menjalankan hak dan kewajiban

mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah (2008) mengemukakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Oleh sebab itu, apabila komitmen organisasinya baik, maka kinerja pemerintah daerah akan baik pula.

Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal pemerintah dan pembangunan dengan tujuan agar kinerja pemerintahan dalam pembangunan itu berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu priode tertentu (Revrisond Baswir, 2004). Namun, suatu kebijakan tidak begitu saja dapat diimplementasikan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Andhika Ardiansyah (2010) menyatakan terdapat pengaruh pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi Jawa Barat, hal ini dikarenakan pengawasan fungsional telah berjalan dengan sesuai aturan yang ditetapkan.

Kualitas pengendalian internal suatu organisasi sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Premis ini menunjukkan bahwa kualitas pengendalian internal suatu organisasi yang baik akan dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi. Sementara kualitas pengendalian internal yang buruk

akan dapat mendorong kinerja organisasi semakin menurun.

Penelitian Prima Yuda (2012) mengenai pengaruh pelaksanaan *good governance* dan pengendalian intern terhadap kinerja organisasi survey pada dinas daerah kota Tasikmalaya disimpulkan pelaksanaan *good governance* dan pengendalian intern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya.

Sebelumnya penelitian yang berjudul pengaruh komitmen organisasi dan pengendalian intern terhadap kinerja telah diteliti oleh Gustika Yolanda Putri (2013) dan penelitian tentang pengaruh pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintah daerah juga telah diteliti oleh Andhika Ardiansyah (2010). Hal yang membedakan antara penelitian yang penulis lakukan dengan hasil penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian dan objek penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin membuktikan bagaimana pengaruh komitmen organisasi, Pengawasan fungsional, pengendalian intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah setiap unit SKPD Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "Bagaimanakah komitmen organisasi, pengawasan fungsional dan pengendalian intern mempengaruhi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu memberi bukti empiris bahwa terdapat pengaruh antara komitmen organisasi, pengawasan fungsional dan pengendalian intern terhadap

kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

TELAAH PUSTAKA

Landasan Teori

Kinerja pemerintah Daerah

Kinerja Pemerintah Daerah merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Menurut Indra (2006) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Kinerja pemerintah daerah adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. (Surjadi, 2009).

Dalam penelitian ini variabel komitmen organisasi diukur dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang digunakan sudah digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu Deki Putra (2013). (Mahoney et al, 1963 dalam Natalia, 2010) Ada delapan dimensi dari kinerja manajerial yaitu: 1)Perencanaan, 2)Investigasi, 3)Pengkoordinasian, 4)Evaluasi, 5)Pengawasan, 6)Pemilihan staf, 7)Negosiasi, 8)Perwakilan dan 9)Kinerja secara menyeluruh.

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk

berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan sendiri (Weiner dalam Coryanata, 2004).

Mathis dan Jackson (dalam Sopiah) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai derajat dimana karyawan percaya dan mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya.

Dalam penelitian ini variabel komitmen organisasi diukur dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang digunakan sudah digunakan oleh peneliti terdahulu, yakni Puspitawati (2011) yang menjadi ukuran komitmen organisasi menurut Mowday yang dikutip Sopiah (2008) ada tiga aspek komitmen organisasi, yaitu : 1)*Affective Commitment*, berkaitan dengan adanya keinginan untuk terikat pada organisasi. 2)*Continuance commitment* yaitu komitmen yang didasarkan akan kebutuhan rasional, dan 3)*Normatif commitment* yaitu komitmen yang didasarkan pada norma yang ada dalam diri karyawan.

Pengawasan Fungsional

Pengertian pengawasan fungsional berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2002 tentang pertimbangan dan pengawasan atas penyelenggara pemerintah daerah mengemukakan bahwa "Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau badan atau unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengkajian, penyusutan dan penilaian".

Sedangkan pengertian pengawasan fungsional menurut Abdul Halim (2002) menyatakan sebagai berikut :“Segala kegiatan dan bentuk tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalannya sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan”.

Dalam penelitian ini variabel pengawasan fungsional diukur dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang digunakan sudah digunakan oleh peneliti terdahulu, yakni Wulandari (2013), dimana yang menjadi ukuran pengawasan fungsional Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2009 adalah: 1)Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah, 2)Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana. 3)Menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, 4)Menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, dan 5)Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah.

Pengendalian Intern

Definisi pengendalian intern yang dikemukakan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO), bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas

operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam peraturan pemerintah ini mengacu pada unsur sistem pengendalian intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai negara, yang meliputi 1)Lingkungan pengendalian 2)Penilaian resiko, 3)Kegiatan pengendalian, 4)Informasi dan komunikasi dan 5)Pemantauan.

Dalam penelitian ini variabel pengendalian intern diukur dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang digunakan sudah digunakan oleh peneliti terdahulu, yakni Fransiska Manurung (2013).

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Apabila setiap pegawai memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan prestasi terbaiknya bagi negara dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, maka tentunya kinerja akan meningkat(Mahmudi, 2007).Untuk mencapai kinerja yang

tinggi, setiap pegawai hendaknya memiliki pertanyaan kepada dirinya sendiri “apa yang bisa saya berikan kepada negara dan masyarakatku?”. Hal itu akan jauh berbeda dengan pertanyaan: “apa yang harus aku lakukan untuk pimpinanku?” Penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2006) menyimpulkan bahwa komitmen organisasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja pegawai.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja pemerintah daerah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Revisond Baswir (2004) menyatakan bahwa: “Pelaksanaan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal pemerintah. pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan kinerja umum pemerintah dan pembangunan dengan tujuan agar kinerja pemerintahan dalam pembangunan itu berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu priode tertentu”

Penelitian yang dilakukan oleh Andhika Ardiansyah (2010) berkesimpulan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintah daerah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah

H2 : Pengawasan Fungsional memiliki pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Kegiatan pengendalian intern terdiri atas rewiw atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah perlu diciptakannya sistem pengendalian intern pemerintah agar instansi pemerintah dapat mengetahui dana publik yang digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Rosdiana : 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Hiro Tugiman (2000) dan Suryo Pratolo (2006) juga mengatakan bahwa terdapat pengaruh pengendalian intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3 : Pengendalian Intern memiliki pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

METODOLOGI PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian assosiatif, yakni penulis mencoba menjawab pengaruh antar variabel yang ada.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk menguji keandalan suatu teori yang kemudian akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis (*hypohotesis testing*), yaitu memperlihatkan sifat dari hubungan variabel terikat dan variabel bebas. Pengaturan penelitian dilakukan secara alamiah (*non-contrived setting*) melalui penelitian lapangan (*field research*) menggunakan survei kuisisioner terhadap responden. Penelitian ini menggunakan horizon waktu *cross-sectional* yakni data dikumpulkan sekali selama penelitian berlangsung.

Populasi yang digunakan adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebanyak 28 SKPD. Sementara yang digunakan adalah seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 28 unit SKPD.

Responden pada penelitian ini adalah Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Kepala Bagian Keuangan. Alasan pemilihan sampel tersebut adalah pimpinan dari setiap unit mampu untuk menggambarkan kinerja dari tiap-tiap unit SKPD, dan dapat mempresentasikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Pengumpulan data akan dilakukan melalui kuisisioner yang diambil dari penelitian Dekki Putra (2013), Puspitawati (2011), Wulandari

(2013), dan Fransiska Manurung (2013). Kuisisioner tersebut akan diberikan kepada responden yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Sumber data ialah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber lokasi penelitian atau sumber asli tanpa melalui pihak perantara. Data primer penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuisisioner yang dibagikan kepada responden pada lokasi penelitian yang telah ditetapkan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuisisioner. Kuisisioner yang disebar kepada responden penelitian. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data, dengan cara menyebarkan sejumlah angket berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian kepada sejumlah responden yang telah ditentukan sebelumnya, guna mendapatkan hasil yang dapat diolah menjadi kesimpulan dalam penelitian ini.

Metode Analisis Data

Analisis Regresi Berganda

Menurut Purwanto (2008) regresi berganda adalah banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.

Bentuk umum persamaan regresi dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \beta^1x_1 + \beta^2x_2 + \beta^3x_3 + e^1$$

Uji Validitas Data

Suatu instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur (Kuncoro, 2003). Pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi *bilvariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruktif. Hasil analisis korelasi *bilvariate* dengan melihat output *Pearson Correlation* (Ghozali, 2005). Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka instrumen yang digunakan dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Indikator untuk uji reliabilitas adalah *Cronbach Alpha*, apabila nilai *Cronbach Alpha* > 0,6 menunjukkan instrumen yang digunakan *reliable*. Sebaliknya jika koefisien alpha instrumen lebih rendah dari 0,6 maka instrumen tersebut tidak *reliable* untuk digunakan dalam penelitian ini, (Ghozali, 2005).

Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak (Imam Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk melihat normalitas data dapat dengan menggunakan grafik *probability plot* yang membandingkan distribusi

kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Imam Ghozali, 2006). Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan formulasi sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{(1 - R^2)}$$

Uji Heterokedastisitas

Menurut Imam Ghozali (2006), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan antara varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain.

Pada penelitian ini menguji ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat *scatter plot*. Jika pada *scatter plot* memiliki titik-titik yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika membentuk pola tertentu, maka terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode

tdengan kesalahan penganggu pada periode sebelumnya (Imam Ghozali, 2006).

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi digunakan uji *Durbin Watson*, yakni dalam pengambilan keputusan dengan melihat berapa jumlah sampel yang diteliti yang kemudian dilihat angka ketentuannya pada tabel *Durbin Watson*.

Pengujian Hipotesis

Dalam Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan melihat koefisien regresi parsial (uji t) untuk mengetahui apakah semua variabel independen yaitu komitmen organisasi, pengawasan fungsional dan pengendalian intern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kinerja pemerintah daerah. Uji signifikan t dilakukan dengan membandingkan nilai t_{table} atau dengan melihat P_{value} masing-masing variabel dengan tingkat signifikansi ditentukan sebesar 5% ($\alpha=0,05$).

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya (Imam Ghozali, 2006).

Semakin besar koefisien determinasi, semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya, dan untuk mengetahui besarnya koefisien determinasi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari hasil kuadrat koefisien korelasi parsial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kuesioner dan Demografi

Hasil survei kuesioner yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan dari Dari 56 kuesioner yang disebar, kuesioner yang kembali sebanyak 50 kuesioner atau 89,28%, dan sebanyak 6 kuesioner atau sebanyak 10,71% tidak merespon dan beberapa data tidak lengkap.

Hasil Statistik Deskriptif

Variabel Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengujian statistik, diketahui bahwa variabel kinerja pemerintah daerah memiliki total skor jawaban responden sebesar 2.145 dengan nilai minimum 600, nilai maksimum 3.000, rata-rata 3,57 dan standar deviasi 4,28. Pada kriteria posisi tanggapan responden terhadap variabel kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan kriteria baik, karena berada pada range 60%-80% berdasarkan hasil hitung menunjukkan nilai 77,76%.

Variabel Komitmen Organisasi

Berdasarkan pengujian statistik, diketahui bahwa variabel komitmen organisasi memiliki skor jawaban responden diperoleh sebesar 1.905 dengan nilai minimum 1.100, nilai maksimum 2.750, rata-rata 3,46 dan standar deviasi 5,71. Pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi atau 50 responden yang diteliti, kriteria posisi jawaban berada pada 60%-80% hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi dilingkungan pemerintahan berjalan dengan baik,

karena hasil hitung kriteria poin dengan nilai 69,27%.

Variabel Pengawasan Fungsional

Berdasarkan pengujian statistik, diketahui bahwa variabel pengawasan fungsional memiliki skor jawaban responden diperoleh sebesar 3.402 dengan nilai minimum 850, nilai maksimum 4.250, rata-rata 4,00 dan standar deviasi 9,07, berdasarkan 50 responden yang diteliti, kriteria posisi tanggapan responden terhadap variabel pengawasan fungsional berada pada 80,04%, hal ini menunjukkan bahwa pengawasan fungsional di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dikategorikan sangat baik karena berada pada kriteria posisi 80%-100%.

Variabel Pengendalian Intern

Berdasarkan pengujian statistik, diketahui bahwa variabel pengendalian intern memiliki skor jawaban responden diperoleh sebesar 4.277 dengan nilai minimum 1.100, nilai maksimum 5.500, rata-rata 3.89 dan standar deviasi 16,83. Berdasarkan SKPD Kabupaten Kuantan Singingi, atau sebanyak 50 responden yang diteliti bahwa kriteria posisi jawaban responden menunjukkan sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dikategorikan baik, karena hasil hitung menunjukkan nilai 77,76%.

Hasil Uji Validitas

Variabel Kinerja Pemerintah Daerah

Pada penelitian ini untuk variabel kinerja pemerintah daerah digunakan 12 item pertanyaan. Hasil

uji validitas masing-masing butir pertanyaan adalah $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,244), maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik masing-masing indikator pertanyaan adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

Variabel Komitmen Organisasi

Pada penelitian ini untuk variabel komitmen organisasi digunakan 11 item pertanyaan. Hasil uji validitas masing-masing butir pertanyaan adalah $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,244), maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik masing-masing indikator pertanyaan adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

Variabel Pengawasan Fungsional

Pada penelitian ini untuk variabel pengawasan fungsional digunakan 17 item pertanyaan. Hasil uji validitas masing-masing butir pertanyaan adalah $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,244), maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik masing-masing indikator pertanyaan adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

Variabel Pengendalian Intern

Pada penelitian ini untuk variabel pengendalian intern digunakan 22 item pertanyaan. Hasil uji validitas masing-masing butir pertanyaan untuk variabel pengendalian intern adalah $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,244), maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik masing-masing indikator pertanyaan adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

Hasil Uji Reliabilitas Data

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat dijustifikasi bahwa

keseluruhan instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, hal ini terlihat dari nilai *cronbach alpha* seluruh variabel yang diteliti lebih besar dari 0.60.

Hasil Uji Normalitas Data

Berdasarkan hasil uji grafik *probability plot* dapat dilihat penyebaran titik-titik di sekitar garis diagonal, dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Hasil Uji Multikolinearitas

Nilai *tolerance* masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,1. Hasil penghitungan VIF juga menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Hasil uji *scatter plot* menunjukkan tidak ada pola yang jelas dan menandakan terjadi heterokedastisitas untuk variabel penelitian, dengan demikian asumsi dasar bahwa variasi residual sama untuk semua pengamatan terpenuhi

Hasil Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diketahui bahwa perhitungan menunjukkan harga DW sebesar 1.218 terletak pada rentang antara -2 sampai dengan +2, sehingga inferensi yang diambil adalah model regresi tidak

mengandung gejala autokorelasi (Singgih, 2012:218).

Hasil Analisis Regresi Berganda

Dari hasil analisis regresi menunjukkan koefisien regresi dari β_1, β_2 , dan β_3 bernilai positif. Hal ini menunjukkan variabel-variabel bebas apabila ditingkatkan maka akan menimbulkan peningkatan pada variabel terikatnya. Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$KA = 23.247 + 0.231KO + 0.202PF + 0.131PI$$

Nilai $a = 23.247$ menunjukkan bahwa jika variabel komitmen organisasi, pengawasan fungsional dan pengendalian intern 0 (nol) maka kinerja SKPD diperoleh sebesar 23.247

Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja SKPD adalah positif, dimana nilai (β_1) adalah = 0.231 artinya apabila komitmen organisasi dinaikan 1% maka kinerja SKPD akan mengalami peningkatan sebesar 23.10%.

Pengaruh pengawasan fungsional terhadap kinerja SKPD adalah positif, dimana nilai (β_2) adalah = 0.202 artinya apabila pengawasan fungsional dinaikan 1% maka kinerja SKPD akan mengalami peningkatan sebesar 20,2%.

Pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja SKPD adalah positif, dimana nilai (β_3) adalah = 0.131 artinya apabila pengendalian intern dinaikan 1% maka kinerja SKPD akan meningkat sebesar 13.1%.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,643. Dengan demikian variabel

dapat menjelaskan variabel komitmen organisasi, pengawasan fungsional dan pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja SKPD sebesar 62%. Sedangkan sisanya 38% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak teramati dalam penelitian ini seperti sumberdaya manusia, akuntabilitas publik, dan kejelasan sasaran anggaran.

PEMBAHASAN

Komitmen Organisasi Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Dari hasil pengujian hipotesis pertama maka dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini di buktikan dengan koefisien regresi sebesar 0.231 dan signifikan 0.042 < 0.05 dan Uji t menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2.088 > 2.000. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah (2008) mengemukakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Oleh sebab itu, apabila komitmen organisasinya baik, maka kinerja pemerintah daerah akan baik.

(Mahmudi. 2007) menyatakan bahwa apabila setiap pegawai memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan prestasi terbaiknya bagi negara dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, maka tentunya kinerja akan meningkat. Untuk mencapai kinerja yang tinggi, setiap pegawai hendaknya memiliki pertanyaan kepada dirinya sendiri “apa yang bisa saya berikan kepada negara dan masyarakatku?”. Hal itu akan jauh berbeda dengan pertanyaan: “apa

yang harus aku lakukan untuk pimpinanku?”.

Pengawasan Fungsional Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Dari hasil pengujian hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini di buktikan dengan koefisien regresi sebesar 0.202 dan signifikan 0.026 < 0.05 dan Uji t menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2.308 > 2.000. Penelitian yang dilakukan oleh Primanda (2008) berkesimpulan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Andika (2010) yang menyimpulkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Revrison Baswir (2004) menyatakan bahwa pelaksanaan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal pemerintah, pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan kinerja umum pemerintah dan pembangunan dengan tujuan agar kinerja pemerintahan dalam pembangunan itu berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu priode tertentu.

Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Dari hasil pengujian hipotesis ketiga maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern

berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini di buktikan dengan koefisien regresi sebesar 0.131 dan signifikan $0.041 < 0.05$ dan Uji t menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.098 > 2.000$.

Bobi Kurniawan (2010) mengatakan bahwa terdapat pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja organisasi, dan di dukung oleh Gustika Yolanda Putri (2013) bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD.

Untuk memperbaiki kinerja pemerintah perlu diciptakannya sistem pengendalian intern pemerintah agar instansi pemerintah dapat mengetahui dana publik yang digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Rosdiana : 2010).

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hasil pengujian hipotesis satu menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi komitmen suatu organisasi maka akan semakin baik kinerjanya dan sebaliknya jika komitmen suatu organisasi rendah maka berpengaruh buruk terhadap kinerjanya.
2. Hasil pengujian hipotesis dua menunjukkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Ini berarti jika pengawasan fungsional di jalankan dengan baik maka kinerja pemerintah akan semakin

baik sebaliknya jika pengawasan fungsional dijalankan dengan buruk maka kinerja pemerintah bisa jadi memburuk.

3. Hasil pengujian hipotesis tiga menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja SKPD, artinya semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan maka kinerja pemerintah daerah juga akan semakin baik sebaliknya semakin buruk sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan maka kinerja pemerintah daerah juga akan semakin buruk.
4. Hasil perhitungan *adjusted R²* sebesar 0.445. Dengan demikian variabel dapat menjelaskan variabel Komitmen Organisasi, Pengawasan Fungsional dan pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja SKPD sebesar 62%. Sedangkan sisanya 38% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak teramati dalam penelitian ini, seperti sumberdaya manusia dan penerapan *good governance*.

Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa kelemahan atau keterbatasan, yaitu:

1. Tidak dilakukannya metode wawancara dalam penelitian, mengingat kesibukan dari pihak responden. Responden meminta agar kuesioner ditinggalkan, sehingga peneliti tidak bisa mengendalikan jawaban responden. Oleh karena itu, jawaban yang diberikan oleh responden belum tentu

- menggambarkan keadaan sebenarnya.
2. Hasil penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi, belum dapat digeneralisir keadaan daerah lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat lebih mengoptimalkan kemampuan generalisir hasil penelitian.

Saran

1. Peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian di provinsi lain khususnya diluar pulau Sumatera, sehingga nantinya hasil bisa digeneralisasi untuk lingkup yang lebih luas serta mencantumkan waktu pengembalian kuesioner.
2. Peneliti selanjutnya dapat lebih maksimal memperoleh data kuesioner yang baik, bila perlu manganjungi SKPD secara langsung karena tingkat pengembaliannya lebih jelas dan dapat dipantau secara langsung.
3. Peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel penelitian lainnya yang dapat mempengaruhi Kinerja SKPD. Seperti variabel sumberdaya manusia, *good governance* dan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Andhika. 2010. *Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah* (Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat)
- Bastian Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat
- Dewinda Putri, Natalia. 2010. *Pengaruh Komitmen Organisasional Dan Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah* (Studi Pada Kabupaten Tegal)
- Ghozali, Imam, 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi Tiga, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Gustika, YP. 2013. *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kinerja Manajerial SKPD*. Universitas Negeri Padang
- Halim, Abdul. 2007, *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3, Jakarta , Salemba Empat
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPF, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2004. *Membangun Akuntabilitas Publik Keuangan Negara*. Media Akuntansi 39/April/ Tahun XI/ 2004
- Mowday dalam Sopiah. 2008. *Perilaku Organisasi*, Yogyakarta : Andi

- Nur Azlina dan Desmiyawati. 2012. *pengaruh Komitmen Organisasi, Pengendalian intern dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*
- Nurjanah. 2008. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan*
- Primanda, R 2008. *Pengaruh budaya organisasi, Locus of Control dan penerapan sistem informasi terhadap kinerja aparat unit-unit pelayanan publik.* Skripsi pada universitas Muhammadiyah Surakarta
- Prasetyono dan Kompyurini Nurul. 2007. *Analisis Kinerja Rumah Sakit Daerah Dengan Pendekatan Balanced Scorecard Berdasarkan Akuntabilitas publik, Akuntabilitas publik Dan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG).* Simposium Nasional Akuntansi. IAI. Makassar
- Ramandei, Pilipus. 2009. *Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah*
- Revrison Baswir. (2004), *Akuntansi Pemerintahan Indonesia,* Yogyakarta
- Robbins SP, dan Judge. 2007. *Perilaku Organisasi,* Jakarta : Salemba Empat
- Srimindarti, C. 2004. *Balanced Scorecard Sebagai Alternatif Untuk Mengukur Kinerja.* STIE Stikubang. Semarang
- Sujana, Edy. 2012. *Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Kesesuaian Peran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor Internal Inspektorat*